

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Buku-buku

- Adrian Sutedi, *Hukum Keuangan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bayumedia Publishing, Malang, 2010.
- Amin Wijaya, *Tanya Jawab Seputar Audit Internal*, Harvarindo, Jakarta, 2015.
- Amirudin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2010.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Falkutas Hukum Universitas Islam Riau, *Buku Pandauan Penulisan Skripsi*, UIR Press, 2012.
- Hendra Karianga, *Politik Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Kencana, Jakarta, 2013.
- Krisna Harahap, *Pemberantasan Korupsi Tiada Ujung*, Grafitri, Bandung, 2009.
- Muhammad Nurul Huda, *Tindak Pidana Korupsi*, Fakultas Hukum UIR, Jakarta, 2014.
- , *Hukum Pidana : Tindak Pidana Korupsi dan Pembaharuan Hukum Pidana*, UIR Press, Jakarta, 2012.
- Masri Singarimbun Dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta, 1989.
- Purjono, *Peran Audit Investigasi Dalam Pemberantasan Korupsi Di Lingkungan Instansi Pemerintah*, BPPK, Jakarta, 2011.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.
- Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, Gramedia, Jakarta, 2014.
- Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi Cetakan Ke-20*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2012

2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan, Peningkatan, Kualitas, Akuntabilitas Keuangan Negara.

Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan.

3. Jurnal dan Artikel

Agung Suseno, *Bisnis & Birokrasi*, Jurnal Administrasi Dan Organistrasi Dan Organisasi, Jan-Apr 2010.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *Fraud Control Plan : Tidak Sekedar Teori Tetapi Sebuah Solusi Menekan Korupsi*, Bogor, 2007

Muhammad Fuat Widyaiswara Utama, *Kendala Penyidik Mengubah Bukti Audit Menjadi Bukti Hukum Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP, Bogor, 2010.

Suhartanto, *Strategi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi: Mengoptimalkan Peran Aparat Pengawasan Internal Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi*, Pusdiklatwas BPKP, Bogor, 2007

4. Internet

[http: www.bpkp.go.id](http://www.bpkp.go.id)

<https://zalirais.wordpress.com/2016/12/15/keuangan-negara-dan-keuangan-badan-usaha-milik-negara-berbentuk-perseroan/>

[http; www.landasanteori.com](http://www.landasanteori.com)

[https; id.wikipedia.org/bpkp](https://id.wikipedia.org/bpkp)

www.pengertianmenurutparaahli.com

<http://www.bpkp.go.id/bengkulu/berita/read/12372/5/Peran-BPKP-Dalam-Penanganan-Tindak-Pidana-Korupsi.bpkp>

<http://www.antikorupsi.org/id/content/diperkuat-peran-antikorupsi-bpk-hasil-audit-bpk-bpkp-bisa-langsung-digunakan-penyidik>

<http://nasional.kompas.com/read/2015/03/26/15000041/Inspektorat.Belum.Paripurna.Cegah.Korupsi>

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58ac1253a9228/siapa-berwenang-menyatakan-kerugian-negara-sema-pun-tak-mengikat>

